

Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar)

Lucfia Anisatul¹

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
E mail: nufhanur@gmail.com

Dewi Saptantinah PA²,

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
E mail: dewi.astutie@gmail.com

Fadjar Harimurti³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
E mail: fadjarharimurti@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the influence of internal control, regional financial accounting system and local financial management to financial performance of Local Government in Karanganyar Regency. The object of research in the Government of Karanganyar Regency, which is in the Regional Revenue and Asset Management Finance Department (DPPKAD) is now renamed Regional Finance Agency (BKD), by distributing questionnaires to related sections, so that purposive random sampling technique is used. Related section is the finance section, which oversees the accounting, budget, treasury and asset section. Then tested the instrument, test the classical assumption and using multiple regression analysis. Conclusion of the test results of each hypothesis shows that (1) internal control significant effect on financial performance Local government (2) regional financial accounting system has a significant effect on financial performance of local government (3) management of regional finances have a significant effect on financial performance of local government. Thus the whole hypothesis is accepted. The results of this study are expected to contribute to the local government on several factors that can be used in assessing the performance of Local Government and also as reference material for further research.

Keywords: internal control, financial accounting system areas, financial management, financial performance

PENDAHULUAN

Daerah memiliki peran dalam mengelola asset, dalam hal ini termasuk keuangan daerah, sehingga masing-masing daerah perlu mengelola keuangan yang

dimilikinya. Untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya. Hal ini tercermin dalam

kinerja pemerintah daerah, dengan demikian setiap kegiatan diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. (Made Budi Sastra Wiguna, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya adalah pengawasan internal. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas – tugas organisasi (Primadona, Alamanda, 2013). Pengawasan internal meliputi suatu kegiatan pengawasan baik administrasi maupun pengelolaan keuangan oleh pihak internal perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang baik. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Untuk dapat mewujudkan *Good Corporate Governance* maka pengawasan internal dalam instansi pemerintah dilakukan oleh BPKP, kemudian informasi hasil dari pengawasan selanjutnya disampaikan kepada Presiden (Dadang Kurnia, 2015).

Penelitian mengenai pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja ini sudah dilakukan oleh Made Budi Sastra Wiguna (2015), yang menunjukkan hasil yang signifikan antara pengawasan dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Primadona, Alamanda (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pengawasan internal berpengaruh dalam kepuasan kinerja pemerintahan kota Bandung.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja suatu Pemerintah Daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Primadona, Alamanda (2013) mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tersebut tidak hanya dapat

memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja. (Wawan dan Lia: 2009 dalam Hidayat, Rahmad,2015). Penelitian dari Hidayat,Rahmad (2015) sendiri juga menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah juga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah kota Padang.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Puji Agus, 2015). Dalam hal ini juga sama dengan pengelolaan keuangan daerah. Hidayat,Rahmad (2015) dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Made Budi Sastra Wiguna (2015) hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian serupa dilakukan oleh Primadona,Alamanda (2013) dengan judul Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Penelitian dilakukan di Kota Bandung, hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan interen dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja. Made Budi Sastra Wiguna dkk (2015) , meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penelitian di Inspektorat Kabupaten Buleleng, hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi baik keseluruhan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dalam penelitian ini peneliti mencoba meninjau tentang penelitian yang mengaitkan pengendalian interen dengan pengelolaan keuangan, yaitu penelitian tentang penerapan pengendalian interen untuk keefektifan pengendalian keuangan (Moh, Omar dan Zaid, 2016), dengan responden penelitian adalah manajer dan pekerja di unit administrasi pemerintahan Jordan, tetapi dalam penelitian ini peneliti merekomendasikan bahwa komponen utama pengendalian interen adalah adanya unsur manusia, yang ditinjau dari rutinitas pekerjaan, kurangnya insentif dan tunjangan,

pertimbangan peneliti dalam hal ini adalah karena apabila pengendalian interen dikaitkan dengan pengendalian keuangan, maka terlalu banyak peraturan dan ketentuan hukum yang melandasinya, dengan demikian peneliti justru memulai dari unsur manusianya.

Penelitian lain dilakukan oleh Hidayat,rahmad (2015), dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman) hasil penelitiannya dari ketiga variabel semuanya juga mendukung kinerja. Penelitian ini merupakan replikasi dari Nur Sholikah,Risdayanti (2016), dengan judul Pengaruh Pengawasan Interen, Pengawasan Sistem akuntansi keuangan daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Kauangan di DPPKAD Kabupaten Boyolali, tetapi dalam penelitian ini menghubungkan ketiga variabel yaitu pengaruh pengawasan interen, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah mengganti variabel kualitas laporan keuangan menjadi variabel kinerja, karena berdasarkan

penelitian-penelitian sebelumnya kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan interen. Sehingga dalam penelitian ini mencoba menghubungkan variabel yang digunakan oleh Nur Solikhah,Risdhayanti tetapi variabel pemahaman sistem akuntansi diganti dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sedangkan variabel dependen kualitas diganti menjadi kinerja. Obyek penelitian juga berbeda karena dilakukan di Kabupaten Karanganyar. Permasalahan penelitian ini adalah apakah pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kontribusi penelitian ini adalah bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan interen, sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja dan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Berdasar uraian di atas maka judul penelitian ini adalah : **“Pengaruh**

Pengawasan Interen, Sistem akuntansi keuangan daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar)”.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan Internal bertujuan agar pelaksanaan kegiatan operasional berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dengan adanya pengawasan yang melekat maka kegiatan akan lebih terkontrol sehingga penyimpangan dapat diminimalkan, dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerja. Made Budi Sastra Wiguna (2015) hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Primadona, Alamanda (2013) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung, meskipun pengawasan intern

tersebut belum optimal tapi dari hasil pengujian sudah menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sehingga berdasar referensi beberapa penelitian terkait maka dinyatakan hipotesis seperti berikut:

H1 : Pengawasan internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah daerah

Hidayat, Rahmad (2015) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. menunjukkan hubungan yang searah, karena semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan baik juga kinerja pemerintah daerah.

Nur Solikhah, Risdhayanti (2016) yang meneliti tentang sistem akuntansi, menghubungkan tingkat pemahaman sistem akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, hasilnya menunjukkan ada pengaruh yang signifikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan memahami sistem akuntansi yang baik maka pihak yang

terkait akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Maka secara otomatis akan dapat menghasilkan kinerja yang baik.

Dengan demikian sistem akuntansi sangat penting untuk dapat diterapkan dalam suatu badan usaha, karena sistem tersebut sangat mendukung kegiatan operasional suatu badan usaha terutama dalam hal ini adalah mendukung kegiatan pemerintahan sehari-hari. Sesuai dengan Kepmendagri No. 13 tahun 2006, pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa:

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Dari teori dan referensi hasil penelitian di atas maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar

3. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Primadona,Almanda (2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hubungan yang searah dengan kinerja. Hidayat,Rahmad (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan suatu hubungan yang searah, yang artinya semakin baik pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Beberapa hasil penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa dengan pengelolaan keuangan yang baik maka akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Dengan demikian hipotesis yang dapat dikemukakan adalah:

H3 : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah survey yang dilakukan di DPPKAD Kabupaten Karanganyar yang sekarang sudah berubah nama menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar. Dipilihnya obyek ini karena badan tersebut bertugas memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar. Jenis datanya adalah data kuantitatif dari hasil skor kuesioner. Sedangkan sumber data adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai BKD/DPPKAD Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 101 orang. Teknik pengampilan sampel menggunakan *purposive random sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasar pertimbangan peneliti, pertimbangannya adalah bagian yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bagian Keuangan, yang membawahi bagian anggaran, bagian perbendaharaan kas, bagian akuntansi dan bagian pengelolaan asset yang kesemuanya berjumlah 49 pegawai.

Penelitian ini menggunakan empat item kuesioner, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengadopsi dari penelitian

Hidayat,Rahmad (2015) dan kuesioner pengawasan internal yang mengadopsi dari penelitian Nur Sholikah,Risdhayanti (2016). Pengujian kualitas data instrumen penelitian dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan rumus Korelasi Pearson dan *Cronbach Alpha*.

Uji asumsi klasik digunakan uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

No.	<i>p value</i>				A	Kesimpulan
	X1	X2	X3	Y		
1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
2	0,001	0,028	0,000	0,000	0,05	Valid
3	0,000	0,006	0,000	0,000	0,05	Valid
4	0,007	0,003	0,000	0,000	0,05	Valid
5	0,013	0,011	0,000	0,003	0,05	Valid
6	0,000	0,010	0,000	0,005	0,05	Valid
7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
8	0,000	0,000	0,000	0,001	0,05	Valid
9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
10	0,000	0,000		0,000	0,05	Valid
11		0,000		0,000	0,05	Valid
12		0,000			0,05	Valid

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda, uji t dan Uji F, serta analisis determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah bagian keuangan yang membawahi beberapa bagian, yaitu bagian anggaran, bagian perbendaharaan kas, bagian akuntansi

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria uji	Kesimpulan
Pengawasan internal	0,856	0,60	Reliabel
Sistem akuntansi keuangan daerah	0,834	0,60	Reliabel
Pengelolaan keuangan daerah	0,842	0,60	Reliabel
Kinerja keuangan pemerintah daerah	0,910	0,60	Reliabel

dan bagian aset yang keseluruhan berjumlah 49 orang. Dari keseluruhan bagian tersebut, semua transaksi bermuara di bagian akuntansi, dengan demikian kuesioner lebih banyak disarankan untuk diisi oleh bagian akuntansi. Adapun jumlah kuesioner yang dapat diolah berjumlah 37, karena sebagian ada yang tidak lengkap dalam menjawab kuesioner.

Hasil uji validitas item untuk variabel pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui uji Korelasi *Pearson* menunjukkan bahwa semua item pernyataan valid, ditunjukkan *p value* < 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Sumber: Data primer diolah,2016

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen diperoleh hasil bahwa instrumen untuk variabel pengawasan internal, sistem

Variabel Independen	Koefisien regresi	Nilai t	Signifikansi
Konstanta	-13,024		
Pengawasan internal	0,437	2,306	0,028
Sistem akuntansi keuangan daerah	0,414	2,376	0,023
Pengelolaan keuangan daerah	0,529	2,091	0,044
F : 8,434			0,000
<i>Adjusted R² : 0,383</i>			

akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan reliabel karena masing-masing variabel menghasilkan *Cronbach Alpha* > 0,60.

Tabel 2: Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Sumber: Data primer diolah,2016

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi linier berganda tidak terjadi masalah multikolinieritas, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, tidak terjadi masalah autokorelasi, dan residual normal.

Tabel 3: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinieritas	<i>Tolerance</i> (0,858; 0,912; 0,793) > 0,1 <i>VIF</i> (1,166; 1,096; 1,261) < 10	Tidak ada multikolinieritas
Uji Autokorelasi	<i>P value</i> (0,996) > 0,05	Tidak ada Autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas	<i>P value</i> (0,558; 0,139; 0,885) > 0,05	Tidak ada Heteroskedastisitas
Uji Normalitas	<i>P value</i> (0,413) > 0,05	Residual normal

Sumber: Data primer diolah,2016

Hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20 disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 4: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Data primer diolah,2016

Hasil uji pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai *t* hitung sebesar 2,306 dengan *p value* (0,028) < 0,005 berarti pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 1 bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa pengawasan internal pada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar penting dilakukan untuk mencegah terjadinya beberapa penyimpangan dalam mencapai tujuan dan

pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Semakin tinggi pengawasan internal maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar akan semakin tinggi. Made Budi Sastra Wiguna (2015) hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Primadona,Alamanda (2013) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung, Dengan demikian penelitian ini konsisten dengan dua penelitian sebelumnya.

Hasil uji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai *t* hitung sebesar 2,376 dengan *p value* (0,023) < 0,005 berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 2 bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dapat mendukung kegiatan

operasional sehari-hari, sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hidayat,Rahmad (2015) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, temuan lain menunjukkan hubungan yang searah, karena semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka akan baik juga kinerja pemerintah daerah. Nur Solikhah, Risdhayanti (2016) yang meneliti tentang sistem akuntansi, menghubungkan tingkat pemahaman sistem akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, hasilnya menunjukkan ada pengaruh yang signifikan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan sistem akuntansi yang baik maka akan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga berakibat pada kinerja yang baik dan berkualitas.

Uji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil uji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai t hitung sebesar 2,091 dengan p value $(0,044) < 0,005$ berarti pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 3 diterima. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 3

bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan kontribusi positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Semakin baik pengelolaan keuangan maka kinerja yang dihasilkan umumnya akan semakin baik pula. Hasil penelitian Primadona,Alamanda (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hubungan yang searah dengan kinerja. Hidayat,Rahmad (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan suatu hubungan yang searah, yang artinya semakin baik pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian penelitian ini konsisten dengan Primadona,Alamanda (2013) dan Hidayat,Rahmad (2015).

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai F hitung sebesar 8,434 dengan p value $(0,000) < 0,05$ berarti model regresi linier berganda dinyatakan tepat (*fit*) dalam memprediksi pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan

keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh nilai *Adjusted R²* adalah 0,383 yang berarti pengaruh pengawasan internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 38,3% sisanya sebesar 61,7% dijelaskan variabel lain, dengan demikian masih banyak variabel yang perlu diteliti lagi.

SIMPULAN

Hasil pengujian setiap hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 1 diterima. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 2 diterima. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 3 diterima.

Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas wilayah penelitian, dengan harapan hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi, dan dapat menghubungkan

beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, karena dilihat dari persentasenya hasil penelitian ini menunjukkan dukungan variabelnya masih sangat rendah, sehingga masih ada beberapa variabel lain yang perlu ditambahkan dalam penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Dadang, Kurnia. 2015. Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Disampaikan pada Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa” Kemenko Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Hidayat, Rahmad. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman). Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri. 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Made, Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Kabupaten Buleleng. e-Journal.undiksha.ac.id. Volume 3 No.1 Tahun 2015. Diakses tanggal 22 Juli 2016.

Mohammad, Omar dan Mohammad, Zaid. 2016. *Evaluation of Internal Control Units for the*

Effectiveness of Financial Control in Administrative

Government Units: A Field Study in Jordan. European Scientific Journal. Vol 12, No 13, May. p 225-256.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah RI. 2008 No. 60. *Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.*

Primadona, Alamanda. 2013. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung). Skripsi, Universitas Komputer, Indonesia.

Puji, Agus. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. www.bppk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 15 Januari 2016.

Nur Solikhah, Risdhayanti. 2016. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada DPPKAD Kabupaten Boyolali). Skripsi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta.